



**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA PERIMBANGAN
TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN SORONG**

***THE INFLUENCE OF REGIONAL ORIGINAL REVENUE AND BALANCED
FUNDS ON THE FINANCIAL PERFORMANCE OF REGIONAL
GOVERNMENT OF SORONG DISTRICT***

Sandi H. Pasaribu

Prodi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ilmu Sosial & Keguruan, Universitas Nani Bili Nusantara

Email : sandihasudungan@gmail.com

Article history :

Received : 06-02-2025

Revised : 07-02-2025

Accepted : 10-02-2025

Published: 12-02-2025

Abstract

Regional Original Income and Balancing Funds are indicators of regional income which serve as references or benchmarks for measuring the level of independence of a region. The higher the level of realization of regional original income, the higher a region's ability to finance financing in its region, but conversely, the higher the realization of a region's balancing funds, the higher the region's dependence on the central government. The aim of this research is to determine the influence of local revenue and balancing funds on the financial performance of the Sorong Regency regional government. Data collection techniques use documentation. The data analysis method used is multiple linear regression analysis by looking at the influence of the three variables simultaneously and partially. Based on the results of the research conducted, it can be seen that local original income and balancing funds have a significant effect on the financial performance of the Sorong Regency regional government. This research also provides advice to the regional government of Sorong Regency, that it should concentrate on continuing to further improve and develop regional financial performance through the potential and ability of the region in generating original regional income and being able to better manage the balancing funds provided by the central government to the regions to create better regional government financial performance.

Keywords : Regional Original Income, Balancing Funds, Regional Government Financial Performance

Abstrak

Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan adalah indikator pendapatan daerah yang menjadi rujukan atau patokan untuk mengukur tingkat kemandirian dari suatu daerah tersebut. Semakin tinggi tingkat dari realisasi pendapatan asli daerah maka semakin tinggi pula suatu daerah untuk membiayai pembiayaan di daerahnya, tapi sebaliknya semakin tinggi realisasi dana perimbangan suatu daerah maka semakin tinggi pula daerah tersebut untuk menjadi ketergantungan kepada pemerintah pusat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah



Kabupaten Sorong. Teknik pengumpulan data menggunakan menggunakan dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda dengan melihat pengaruh dari ketiga variabel tersebut secara simultan dan parsial. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat diketahui bahwa pendapatan asli daerah dan dana perimbangan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Sorong. Penelitian ini juga memberikan saran kepada pemerintah daerah Kabupaten Sorong, sebaiknya berkonsentrasi untuk terus dapat lebih meningkatkan dan mengembangkan kinerja keuangan daerah melalui potensi dan kemampuan daerah dalam menghasilkan pendapatan asli daerah serta semakin bisa mengelola dana perimbangan yang diberikan pemerintah pusat ke daerah untuk menciptakan kinerja keuangan pemerintah daerah yang semakin baik.

Kata Kunci : Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

PENDAHULUAN

Pengelolaan pemerintah daerah, baik ditingkat propinsi maupun ditingkat kabupaten/kota memasuki era baru sejalan dengan dikeluarkannya UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 25 Tahun 1999 yang kemudian dalam perkembangannya aturan ini diperbaharui dengan dikeluarkannya UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 33 Tahun 2004. Kedua UU ini berbicara tentang Pemerintahan Daerah dan Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Aturan ini merupakan tantangan dan peluang bagi Pemerintah Daerah yang dikarenakan PEMDA memiliki kewenangan yang cukup besar untuk mengelola sumber daya yang dimilikinya secara efisien dan efektif.

Lahirnya otonomi ini merupakan perwujudan dari pergeseran sistem pemerintahan yaitu sistem sentralisasi menuju sistem desentralisasi. Yang mana penyelenggaraan desentralisasi diharapkan dapat mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran masyarakat. Disamping itu daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan serta potensi dan keanekaragaman daerah. Pemberlakuan suatu sistem desentralisasi tentunya ada tujuan tertentu yang ingin dicapai. Adapun beberapa tujuan desentralisasi adalah sebagai berikut : 1. Mencegah Pemusatan Keuangan, 2. Bentuk Demokrasi Pemerintah Daerah, 3. Perbaikan Ekonomi Sosial.

Pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri No. 13 Tahun 2016 mengenai kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, asas umum dan struktur APBD, penyusunan APBD, penetapan APBD, penyusunan dan penetapan APBD bagi daerah yang belum memiliki DPRD, pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah, kerugian daerah, dan pengelolaan keuangan BLUD (Permendagri, 2006). Pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah juga tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja masing-masing perangkat daerah. Lingkup anggaran menjadi relevan dan penting dilingkungan pemerintah daerah karena merupakan media utama pemerintah dalam melakukan alokasi sumber daya dan sebagai media untuk mengevaluasi kinerja pemerintah daerah. Pengelolaan dalam bentuk alokasi anggaran publik diharapkan dapat



mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat agar dapat mandiri secara ekonomis.

Kinerja Keuangan menurut Fahmi (2012) mengenai ukuran dari suatu usaha yang dilakukan untuk melihat sejauh mana organisasi atau instansi tertentu melaksanakan aktivitas yang berhubungan dengan keuangan sesuai aturan-aturan yang berlaku dengan baik dan benar. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Pasal 4 No 105 Tahun 2000 yang menegaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatuhan. Menurut UU No. 17 Tahun 2003, laporan keuangan yang harus di susun oleh pemerintah daerah setidaknya meliputi Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan daerah.

Penilaian Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dilakukan dengan menggunakan analisis rasion terhadap APBD. Hasil dari perhitungan analisis rasio yang dilakukan pada APBD, selanjutnya dapat digunakan sebagai pedoman pengukuran untuk menilai Kinerja Keuangan Pemerintah suatu daerah dalam hal pengelolaan sumber daya keuangan. Pemerintah daerah sebagai pihak yang diberikan tugas menjalankan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat wajib melaporkan pertanggungjawaban keuangan daerah sebagai dasar penilaian kinerja keuangannya. Penilaian kinerja keuangan PEMDA sangat berbeda dengan penilaian kinerja keuangan perusahaan. Selain berbasis anggaran, keuangan PEMDA tidak memiliki tujuan untuk memaksimalkan keuntungan atau laba, meskipun ada sebutan *surplus* atau *deficit* untuk selisih antara pendapatan dan belanja. Kinerja keuangan PEMDA dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor utama antara lain, penerimaan daerah, belanja daerah, pembiayaan daerah, sumber daya manusia dan kondisi makro ekonomi suatu daerah. Oleh karena itu, kinerja keuangan PEMDA yang menjadi poin penting.

Dalam kenyataannya sendiri persentase kemampuan daerah dalam membiayai pengeluarannya masih kecil dan sebagian besar masih berharap pada dan transfer dari pemerintah pusat. Sebagian besar wilayah Indonesia masih sangat kecil yakni masih berada di kisaran 25% dari Total Penerimaan Daerah (TPD), hal ini menunjukkan bahwa pendapatan daerah guna menyokong anggaran belanjanya masih ditopang sebagian besarnya oleh dana transfer pemerintah pusat dan sumbangan-sumbangan lainnya yang sah dan telah diatur di dalam undang-undang yakni sebesar 75% dari total penerimaan daerah (TPD). Hal ini tentu mengindikasikan bahwa kemampuan daerah untuk dapat mengatur perekonomian serta potensi yang dimilikinya masih sangat terbatas karena factor ketergantungan kepada pemerintah pusat yang masih amat besar, sehingga banyak kebijakan dari pemerintah dalam pengelolaan potensi sumber keuangan harus diikuti oleh pemerintah daerah dan sumber-sumber keuangan yang potensial masih tetap dikuasai oleh pemerintah pusat. Sehingga ada beberapa permasalahan keuangan daerah yang dihadapi oleh kabupaten/kota di provinsi Papua Barat yaitu : 1. Ketergantungan pemerintah daerah kepada subsidi dari pemerintah pusat yang tercermin dalam besarnya bantuan pemerintah pusat baik dari sudut anggaran rutin, yaitu subsidi daerah otonom maupun dari sudut anggaran pemerintah daerah,



2. Rendahnya kemampuan daerah untuk menggali potensi sumber-sumber pendapatan asli daerah yang tercermin dari PAD yang relative kecil di banding total penerimaan daerah. 3. Kurangnya usaha dan kemampuan penerimaan daerah dalam pengelolaan dan menggali sumber-sumber pendapatan yang ada.

METODE PENELITIAN

1. Desain Penelitian

Penelitian ini adalah jenis penelitian kuantitatif dengan analisis data sekunder.

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam analisis regresi ini yaitu data runtut waktu (*time series*). Data runtut waktu berdasarkan observasi yang dilakukan pada waktu yang berbeda. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder yang digunakan adalah pendapatan asli daerah dan dana perimbangan Kabupaten Sorong Tahun 2020-2024.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan suatu cara atau proses yang sistematis dalam pengumpulan, pencatatan dan penyajian fakta untuk tujuan tertentu. Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumentasi.

4. Klasifikasi Variabel dan Definisi Operasional Variabel

Dalam penelitian ini, variabel dependen (Y) yang digunakan adalah kinerja keuangan pemerintah daerah, sedangkan variabel independennya terdiri dari pendapatan asli daerah (X_1), dana perimbangan (X_2).

Definisi operasional dan pengukuran untuk variabel-variabel tersebut adalah :

- a. Kinerja keuangan pemerintah daerah (Y) merupakan hasil atau ukuran suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu organisasi pemerintah telah melaksanakan kegiatannya dengan menggunakan aturan- aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar. Pengukuran variabel kinerja keuangan ini di ukur dengan skala rasio.
- b. Pendapatan Asli Daerah (X_1) yaitu merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah yang dilihat dari laporan realisasi APBD pada bagian pendapatan. Pengukuran variabel ini menggunakan nilai nominal dari jumlah penerimaan PAD dalam setahun. Pengukuran variabel PAD ini di ukur dengan skala rasio.
- c. Dana Perimbangan (X_2) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi bertujuan untuk menciptakan keseimbangan keuangan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan antar pemerintah daerah. Pengukuran variabel dana perimbangan ini di ukur dengan skala rasio.



5. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di BPKAD Kabupaten Sorong sebagai lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa masih diperlukannya upaya peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah.

6. Metode Analisis Data

Sebelum melakukan pengujian dengan regresi linear berganda, terlebih dahulu dilakukan Uji Asumsi Klasik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Hipotesis ini menunjukkan bahwa PAD berpengaruh terhadap kinerja keuangan, artinya, semakin besar PAD maka semakin baik kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten sorong sesuai dengan prinsip-prinsip otonomi daerah. Dengan demikian kinerja keuangan menunjukkan bahwa kemampuan kemandirian keuangan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahannya dan akan semakin bertambahnya PAD tiap tahunnya di kabupaten sorong.

PAD sebagai sumber pendapatan yang bersih yang mana pemerintah daerah berwenang dan memiliki kebebasan dalam mengelola sumber pendapatan yang berasal dari daerahnya sendiri. Semakin tinggi penerimaan PAD yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, maka menunjukkan kemampuan suatu daerah dalam mengelola dan optimalisasi potensi dan sumber pendapatan suatu daerah tersebut sehingga akan memaksimalkan penerimaan pemerintah daerah yang nantinya akan berdampak pada kinerja keuangan pemerintah daerah yang semakin baik.

Pemerintah daerah Kabupaten Sorong lebih menekankan atas PAD terutama dari sumber penerimaan pajak daerah, dan retribusi daerah karena dua sektor tersebut merupakan penyumbang terbesar PAD. Semakin besar PAD yang dimiliki oleh pemerintah daerah maka semakin baik kinerja keuangan pemerintah daerah tersebut.

2. Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Hipotesis ini menunjukkan bahwa dana perimbangan berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Dana perimbangan yang meliputi dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK) dan dana bagi hasil (DBH) merupakan dana transfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dengan tujuan untuk membiayai kelebihan belanja daerah. Apabila realisasi belanja daerah lebih tinggi dari pada pendapatan daerah maka akan terjadinya defisit. Oleh karena itu menutupi kekurangan belanja daerah maka pemerintah pusat mentransfer dana dalam bentuk dana perimbangan kepada pemerintah daerah. Kewajiban pemerintah pusat kepada pemerintah daerah juga masih sangat dibutuhkan untuk mendukung pembangunan daerah sehingga diperlukan dana perimbangan untuk mempercepat



pembangunan daerah. Oleh karena itu dengan adanya dana perimbangan yang diberikan oleh pemerintah pusat maka pemerintah daerah dapat meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah. Namun, hal ini bisa pula menggambarkan bahwa suatu daerah memiliki tingkat ketergantungan kepada pemerintah yang sangat tinggi, maka kemandirian suatu daerah tersebut menurun.

3. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Hipotesis ini menunjukkan bahwa secara simultan seluruh variabel PAD dan dana perimbangan berpengaruh secara signifikan terhadap variabel kinerja keuangan pemerintah daerah. Dengan demikian model regresi dapat dijelaskan bahwa PAD dan dana perimbangan secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten sorong.

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa PAD dan dana perimbangan berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten sorong, sehingga hasil ini menunjukkan bahwa semakin meningkatnya pendapatan asli daerah dan dana perimbangan maka kualitas kinerja keuangan pemerintah daerah akan semakin meningkat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim & Syam Kusufi. 2012. *Akuntansi Sektor Publik : Teori, Konsep dan Aplikasi*. Salemba Empat. Jakarta.
- Bastian, Indra. 2015. *Akuntansi Sektor Publik : Suatu Pengantar*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Ditjen Bina Keuangan Daerah. 2013. *Belanja Modal Pemerintah Daerah Harus Capai 30 Persen*. Artikel <http://keufa.kemendagri.go.id/artikel/detail/41-belanjamodal-pemda-harus-capai-30-persen>
- Djaenuri. Aries. 2012. *Hubungan Keuangan Pusat- Daerah*. Ghalia Indonesia: Jakarta. Fahmi, Irham. 2012. "Analisis Kinerja Keuangan", Bandung: Alfabeta
- Halim, Abdul. 2016. *Manajemen Keuangan Sektor Publik Problematika Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hendro. Sumarjo. 2010. *Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah*. Skripsi, Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- Irham. Fahmi. 2012. *Analisis Kinerja Keuangan*. Bandung: Alfabeta.
- Julitawati. 2012. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh*. Jurnal Akuntansi ISSN 2302-0164 Volume I, No.I, Agustus 2012. Universitas Syiah Kuala.
- Mardiasmo, (2009). *Akuntansi Sektor Publik*, Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mahsun. Mohamad. 2013. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Penerbit BPFE: Yogyakarta.
- Mahmudi. 2016. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Edisi Dua. Yogyakarta : UPP STIM YKPN.



- Mutiaranisa. Estetika. 2015. *Analisis Pengaruh PAD, Dana Perimbangan, Belanja Daerah, PDRB, dan IPM terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah pada Daerah Otonom Baru di Indonesia*. Thesis. Universitas Sebelas Maret.
- Permendagri No. 21 Tahun 2011 tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2000 Tentang *Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah*. Jakarta. 2000.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang *Standar Akuntansi Pemerintah*. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang *Dana Perimbangan*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang *Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*. Peraturan Pemerintah RI Nomor 71 Tahun 2010 tentang *Standar Akuntansi Pemerintah*.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.07/2013 tentang *Pengalokasian Anggaran Transfer ke Daerah*.
- Rachmah. Siti Nur. 2015. *Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Kota dan Kabupaten Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2012)*. Skripsi. UMS. Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1999 tentang *Pemerintah Daerah*. Jakarta. 1999. Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2000 tentang *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang *Keuangan Negara*. Jakarta. 2003. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang *Pemerintah Daerah*. Jakarta. 2004.
- Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang *Perimbangan Keuangan antara pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah*. Jakarta. 2004.
- Wibowo, 2011. *Manajemen Kinerja*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Wiratna Sujarweni, 2016. *Kupas Tuntas Penelitian Akuntansi dengan SPSS*.
- www.djkgp.depkeu.go.id